

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan di negara berkembang seperti halnya Indonesia sudah menjadi topik pembahasan yang belum ada pemecahannya. Hal ini dapat dilihat dari tidak seluruh masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, dengan tingkat persaingan kerja yang tinggi. Ketidakmampuan masyarakat mendapatkan pekerjaan yang layak membuat masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup secara maksimal. Ada empat bentuk kemiskinan (Suryawati, 2004: 1) yaitu :

1. Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan atau mendefinisikan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin.

2. Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerahdaerah yang belum terjangkau oleh

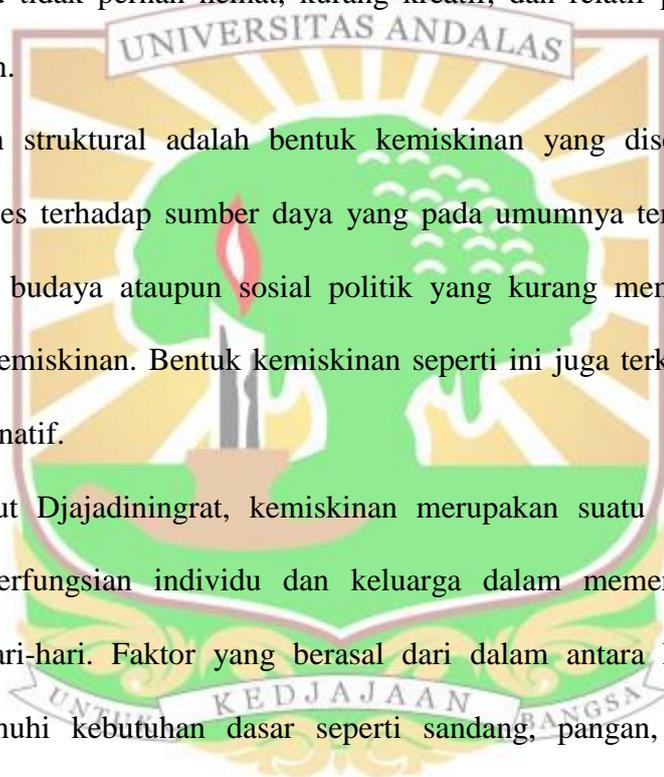
program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.

3. Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara moderen. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.

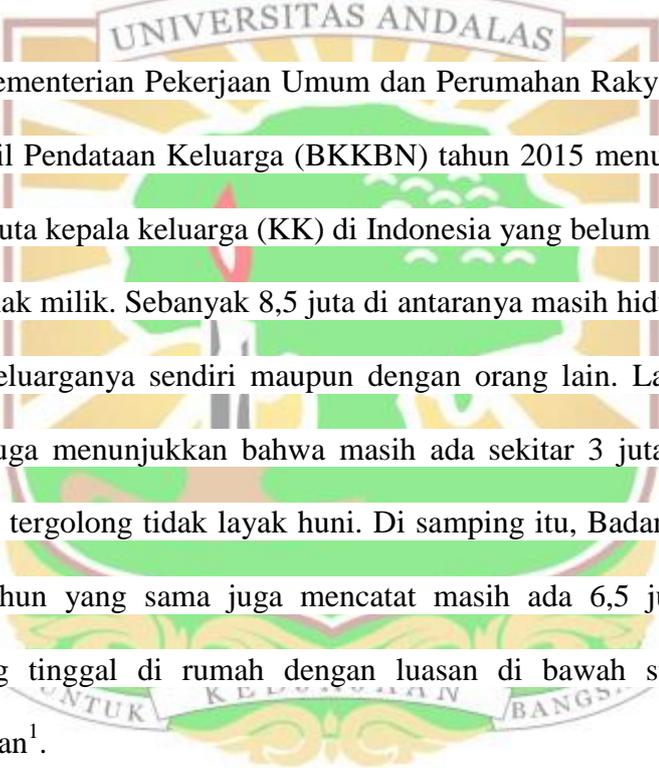
4. Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif.

Menurut Djajadiningrat, kemiskinan merupakan suatu ketidakberadaan atau ketidakberfungsian individu dan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Faktor yang berasal dari dalam antara lain yaitu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, kesehatan dan pendidikan, tidak mampu mengatasi masalah sosial yang dihadapinya, padahal sebenarnya mereka punya potensi yang dapat dikembangkan sesuai kemampuannya (Vino, 2011:1).

Menurut Badan Pusat Statistik kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak (BPS, 2002:3-4). Hidup layak dapat diartikan sebagai tercukupinya kebutuhan keluarga



untuk bertahan hidup. Salah satu ciri umum dari kemiskinan adalah kondisi tempat tinggal yang jauh dari standar kelayakan, mata pencaharian yang tidak menentu dan pendapatan yang jauh dari memenuhi kebutuhan hidup. Tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berperan sebagai tempat beristirahat dan berlindung dari cuaca, sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi mendatang, serta merupakan pengejawantahan jati diri (Zulkarnain, 2016;52).



Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diolah dari hasil Pendataan Keluarga (BKKBN) tahun 2015 menunjukkan, masih ada sekitar 13 juta kepala keluarga (KK) di Indonesia yang belum memiliki rumah dengan status hak milik. Sebanyak 8,5 juta di antaranya masih hidup menumpang, baik dengan keluarganya sendiri maupun dengan orang lain. Lalu hasil olahan data TNP2K juga menunjukkan bahwa masih ada sekitar 3 juta unit rumah di Indonesia yang tergolong tidak layak huni. Di samping itu, Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun yang sama juga mencatat masih ada 6,5 juta keluarga di Indonesia yang tinggal di rumah dengan luasan di bawah standar minimal kelayakan hunian¹.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman disebutkan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan

¹ Kompas.com, diakses pada 11 Januari 2019

terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu program yang dilahirkan oleh Pemerintah sebagai tindak lanjut dari UU tersebut yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Definisi BSPS adalah program yang diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya di singkat BSPS merupakan bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Penerima bantuan diwajibkan untuk memenuhi syarat ketentuan yang telah ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga, memiliki atau menguasai tanah, belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni, belum pernah memperoleh bantuan stimulan perumahan swadaya dari pemerintah pusat, berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum provinsi setempat, diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya dan bersedia membuat pernyataan. Rumah tidak layak huni menurut Surat Edaran Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 18/M/PR.01.03/01/2012 adalah rumah yang tidak memenuhi standar layak huni yang mencakup kecukupan luas, kualitas, dan kesehatan.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sendiri merupakan salah satu program yang lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang merupakan revisi dari

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992. Pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 disebutkan bahwa: (1) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan, (3) Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana yang dimaksud ayat 2 dapat berupa: a) Subsidi perolehan rumah; b) Stimulan rumah swadaya; c) Insentif perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan dibidang perpajakan; d) Perizinan; e) Asuransi dan penjaminan; f) Penyediaan tanah; g) Sertifikasi tanah; dan/atau h) Prasarana, sarana, dan utilitas umum. Selanjutnya, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/ Lembaga, serta petunjuk-petunjuk teknis yang berupa surat edaran yang dikeluarkan Kementerian Perumahan Rakyat.

Penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yaitu masyarakat miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki kemampuan memenuhi lebih setengah dari kebutuhan dasarnya, tapi tidak mampu memenuhi kecukupan kebutuhan dasarnya dan penerima BSPS meliputi perseorangan atau kelompok. Masyarakat Berpenghasilan Rendah berdasarkan Surat Edaran

Kementrian Perumahan Rakyat Nomor 25/SE/DS/4/2012 (MBR) adalah: “Masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya belisehingga perlu mendapat dukungan dari pemerintah untuk memperoleh rumah. Standar maksimum penghasilan calon penerima bantuan adalah Rp.1.250.000 per bulan. Selain berpenghasilan rendah dan menempati rumah tidak layak huni penerima bantuan diutamakan dari masyarakat yang telah memiliki rencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah, yang dibuktikan dengan memiliki tabungan bahan bangunan, sebelumnya telah memulai membangun rumah, memiliki aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan. Adapun besarnya bantuan untuk masing-masing penerima bantuan ialah Rp. 15.000.000,- dengan sumber pendanaannya dari APBD”. Lingkup bantuan stimulan ini adalah untuk pembangunan rumah baru, peningkatan kualitas rumah, dan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Kementerian PUPR melaksanakan BSPS ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. BSPS banyak membantu masyarakat yang masih memiliki rumah tidak layak huni sehingga masyarakat hidup nyaman di rumah yang telah dibedah. Berdasarkan keterangan Direktur Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Johny Fajar Sofyan Subrata melalui siaran persbisnis.com pada 2015 jumlah rumah yang berhasil dibedah atau ditingkatkan kualitasnya di Indonesia sebanyak 82.245 unit, sedangkan 2016 meningkat menjadi 97.888 unit.

Pada 2017 jumlahnya 112.732 unit dan pada 2018 melonjak ke angka 201.304 unit.²

Ketentuan tanah bagi penerima BSPS yaitu tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas, tidak dalam sengketa dan lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Program BSPS diharapkan dapat membantu masyarakat miskin agar bisa meningkatkan kualitas rumahnya agar menjadi lebih layak huni. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan terus mendorong masyarakat miskin agar dapat meningkatkan kualitas rumahnya sendiri sehingga menjadi layak huni.

Dengan adanya BSPS ini diharapkan dapat memotivasi dan memancing masyarakat untuk membangun rumah yang layak. Diharapkan dengan adanya dana pancangan yang diberikan kepada penerima BSPS, masyarakat dapat merespon dengan baik dan membantu dengan swadaya masyarakat sehingga memungkinkan masyarakat yang memiliki rumah tidak layak dapat memperbaiki rumahnya dan mengurangi angka rumah tidak layak huni di Indonesia.

Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu sasaran program BSPS. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dari Kementerian PUPR jumlah rumah yang berhasil di bedah pada tahun 2017 di provinsi Sumatera Barat yaitu 3.625 unit dengan anggaran Rp. 52.410.000.000. Di provinsi Sumatera Barat, penulis mendalami BSPS di Nagari Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam.

²<https://ekonomi.bisnis.com/read/20191025/47/1163466/program-bedah-rumah-tetap-berlanjut-pada-2020>, diakses pada 5 Desember 2019 pukul 14.10

Berdasarkan survei awal, penulis menemukan bahwa pengerjaan pembangunan rumah terlambat dari waktu yang ditentukan dari deadline pemerintah. Namun, dengan adanya kearifan lokal masyarakat setempat kendala tersebut diterima oleh pemerintah dan memperpanjang waktu pengerjaan. Selain itu, berdasarkan wawancara penulis mendapatkan informasi bahwa swadaya gotong-royong dalam pembangunan rumah yang diharapkan dari program BSPS ini kelihatannya masih dilakukan secara individu, namun masyarakat memiliki cara sendiri dalam mewujudkan swadaya tersebut. Oleh karena itu berpijak dari permasalahan yang telah dipaparkan diatas mengenai program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menjadi dasar peneliti perlu untuk dilakukan penelitian dengan judul **“Swadaya Masyarakat dalam Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya”**.

B. Rumusan Masalah

Salah satu bentuk kemiskinan adalah kondisi rumah yang tidak layak huni. Untuk meminimalisir hal tersebut, pemerintah membuat program guna mengurangi ketidaksejahteraan hidup masyarakatnya, salah satu programnya yaitu BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya). Pelaksanaan program BSPS di Nagari Tiku Utara memiliki kendala di dalam penerapannya. Warga memiliki batas waktu tertentu dalam mengerjakan rumah sesuai aturan dari pemerintah. Sedangkan yang terjadi di Nagari Tiku Utara, saat waktu yang ditentukan pemerintah harusnya selesai, namun warga tersebut belum selesai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga, penulis menyimpulkan bahwa cara masyarakat merespon bantuan tersebut tidak lepas dari kebiasaan dan

kebudayaan setempat. Masyarakat punya cara tersendiri untuk mensiasati bantuan yang diberikan pemerintah. Selain itu masyarakat juga mengalami kesulitan dikarenakan dana 15 juta dalam bentuk material bangunan ke setiap penerima. Masyarakat harus membayar sendiri upah tukang bangunan sementara upah tersebut diberikan secara tunai. Sebagai masyarakat yang kurang mampu tentu hal ini menjadi kendala bagi masyarakat. Masalah lainnya, pembangunan rumah yang diharapkan BPS dilakukan secara gotong royong tidak tercapai, masyarakat mengerjakannya secara individu.

Untuk menemukan penjelasan mengenai kondisi tersebut dan bagaimana masyarakat mengakali kondisi tersebut dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi fokus untuk penelitian yaitu :

1. Bagaimana proses BPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) di Nagari Tiku Utara?
2. Bagaimana bentuk swadaya masyarakat terhadap BPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) di Nagari Tiku Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan proses BPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) di Nagari Tiku Utara
2. Mendeskripsikan bentuk swadaya masyarakat terhadap BPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) di Nagari Tiku Utara

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

Tulisan ini diharapkan akan dapat memberikan bahan masukan dan informasi yang sangat penting bagi pemerintah pusat untuk menemukan resolusi yang bisa diajukan agar BSPS dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

2. Manfaat ilmiah

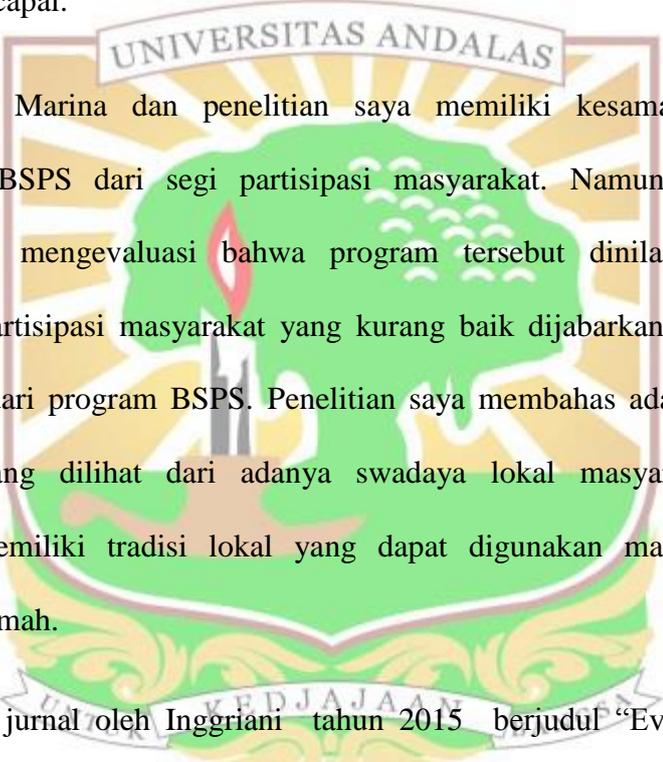
Tulisan ini diharapkan akan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu khususnya dalam Ilmu Antropologi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang implementasi pembangunan pemerintah bukanlah yang pertama. Sebelumnya telah banyak penelitian dan tulisan tentang itu. *Pertama*, skripsi yang ditulis Marina pada tahun 2016 Universitas Bengkulu yang berjudul “Respon Masyarakat Terhadap Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Studi Kasus Penerima BSPS Desa Pondok Kelapa, Kec. Pondok Kelapa, Kab. Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu)”. Respon masyarakat yang dilihat adalah dari persepsi, sikap dan partisipasi masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa respon masyarakat terhadap Program BSPS kurang baik, dilihat dari persepsi masyarakat, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pengertian program BSPS, tujuan program, kriteria penerima, pelaksanaan program, persyaratan penerima dan

penarikan dana, sehingga adanya penilaian dari masyarakat mengenai program BSPS yaitu kurang baik dikarenakan pencairan dana hanya berupa bahan bangunan saja, sikap masyarakat kurang menerima program BPS yang hanya berupa bahan bangunan saja, sehingga partisipasi masyarakat terhadap program kurang. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan pendapatan masyarakat agar program yang dijalankan berjalan dengan baik sehingga dalam pengentasan kemiskinan tercapai.



Skripsi Marina dan penelitian saya memiliki kesamaan membahas implementasi BPS dari segi partisipasi masyarakat. Namun perbedaannya Marina hanya mengevaluasi bahwa program tersebut dinilai kurang baik dikarenakan partisipasi masyarakat yang kurang baik dijabarkan dengan alasan secara teknis dari program BPS. Penelitian saya membahas adanya partisipasi masyarakat yang dilihat dari adanya swadaya lokal masyarakat. Artinya, masyarakat memiliki tradisi lokal yang dapat digunakan masyarakat untuk membangun rumah.

Kedua, jurnal oleh Inggriani tahun 2015 berjudul "Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Dharmasraya. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh bahwa pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Dharmasraya belum berjalan optimal hal ini disebabkan karena:

1. Sumberdaya pendukung untuk pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Dharmasraya kurang memadai,

khususnya sumber daya manusianya, dan koordinasi antara masyarakat, Bappeda serta Kemenpera belum berjalan seperti yang diharapkan.

2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Dharmasraya, diantaranya:

- a. Komunikasi
- b. Sumber daya
- c. Disposisi (kecenderungan sikap)
- d. Struktur birokrasi

Skripsi Inggriani dan penelitian saya memiliki kesamaan membahas mengenai evaluasi BSPS. Namun Inggriani mengevaluasi dari sudut pandang pelaksanaan BSPS yang dilaksanakan oleh pemerintahnya. Evaluasi yang digunakan menggunakan skema umum penilaian evaluasi dari Nurcholis pada tahun 2005 yaitu input, proses, output, dan outcome. Sedangkan penelitian saya mengevaluasi program BSPS dari segi partisipatifnya.

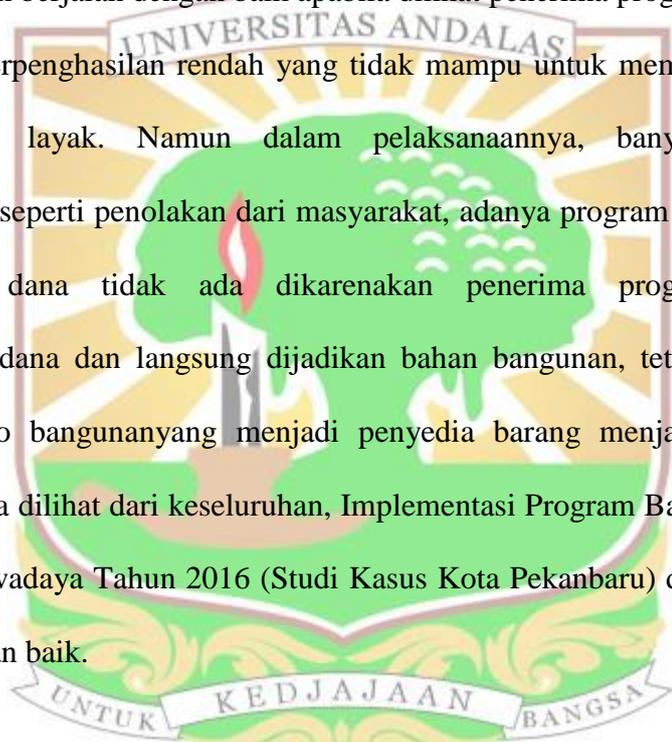
Ketiga, skripsi Ashifa Rizki Priadi tahun 2018 yang berjudul Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Penyediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Langkat. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam penyediaan perumahan yang layak huni di Kabupaten Langkat belum berjalan optimal. Termasuk kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat serta kurangnya pengetahuan tentang program BSPS. Selain itu, dalam tahap pembangunan yang harus dilakukan dalam gotong royong dengan kelompok yang telah ditentukan tetapi pada kenyataannya masih dilakukan secara individual. Peneliti juga melihat

bahwa implementor program ini belum memiliki ketegasan karena masih membiarkan masyarakat bekerja secara individual dan cenderung apatis terhadap hal tersebut. Padahal mereka mengerti apa sebenarnya konsep dan tujuan program BSPS yakni meningkatkan keswadayaan masyarakat agar mandiri dan berdayaguna. Implementor baik dari Dinas Perkim maupun fasilitator belum mampu untuk mengajak masyarakat sadar dan paham dengan konsep dari BPSB walaupun sudah dilakukan sosialisasi sebelumnya.

Keempat, skripsi M. Rara Arizona S. tahun 2015 dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Pandeglang Tahun 2012. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan berjalan tidak optimal dan kurang sesuai dengan pedoman pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam Permenpera No. 14 Tahun 2011. Pencapaian penerima tidak optimal, lemahnya sosialisasi, tidak terciptanya swadaya masyarakat yang baik, TPM melakukan pembelian bahan-bahan bangunan dengan tidak melibatkan penerima, terdapat masyarakat yang tidak mempunyai rumah hunian layak tetapi tidak menjadi penerima, serta ditemukan bahwa dalam proses pembangunan perbaikan rumah khususnya di Kecamatan Cadasari harus tertunda menunggu Bulan Safar (Hijriah) berakhir, hal ini berkenaan dengan kearifan lokal masyarakat setempat.

Kelima, jurnal Mailasari pada tahun 2016 yang berjudul “Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016 (Studi Kasus kota Pekanbaru)”. Penulis menggunakan indikator dengan teori yang

dinyatakan oleh Donald Van Meter dan Carln Van Horn dalam Sujianto (2008:34) yang dipengaruhi oleh enam variabel namun penulis menggunakan lima variabel yaitu Standard dan tujuan kebijakan, Sumber daya kebijakan (Policy resources), Aktivitas pengamatan dan komunikasi interorganisasi, Disposisi atau sikap pelaksana, Kondisi ekonomi, sosial dan politik. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sudah berjalan dengan baik apabila dilihat penerima program merupakan masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mampu untuk membangun tempat tinggal yang layak. Namun dalam pelaksanaannya, banyak ditemukan permasalahan seperti penolakan dari masyarakat, adanya program lain. Walaupun permasalahan dana tidak ada dikarenakan penerima program langsung mendapatkan dana dan langsung dijadikan bahan bangunan, tetapi kekurangan stok dari toko bangunan yang menjadi penyedia barang menjadi kendala. Namun apabila dilihat dari keseluruhan, Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2016 (Studi Kasus Kota Pekanbaru) dikatakan sudah berjalan dengan baik.



Dari kelima penelitian tersebut, kebanyakan membahas tentang evaluasi program BPS dari segi pemerintahan atau dari segi pembuat kebijakan. Dan yang dievaluasi adalah apakah program berjalan sesuai dengan peraturan yang dibuat. Dan saya sendiri ingin melihat BPS dari segi masyarakat, yaitu bagaimana masyarakat mensiasati swadaya dengan cara mereka.

F. Kerangka Pemikiran

Program bantuan perumahan dari pemerintah dikombinasikan dengan swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat dalam hal ini bertindak sebagai perantara antara program bantuan perumahan dari pemerintah dengan masyarakat sebagai pemanfaat program. Kombinasi ini menghasilkan program BSPS. Contoh utama dari swadaya masyarakat ini adalah *baralek batagak kudo-kudo*. Pemerintah menggunakan swadaya masyarakat sebagai alat perantara antara program bantuan perumahan dengan masyarakat setempat. Hal ini membuktikan bahwa budaya masyarakat setempat dalam bentuk swadaya digunakan sebagai alat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan program BSPS.

Penelitian ini melihat bagaimana bentuk swadaya masyarakat yaitu *baralek batagak kudo-kudo*, dan tradisi ini akan dilihat melalui teori *resiprositas* oleh *Marcell Mauss*. Menurut Haviland (1993) *resiprositas* mengacu pada suatu transaksi antara dua pihak dimana barang dan jasa yang kira-kira sama nilainya dipertukarkan. Yang merupakan motif utama ialah memenuhi kewajiban sosial dan barangkali bersama-sama dengan itu sedikit menambah kewibawaan sosial. Dalam prosesi *baralek batagak kudo-kudo* yang dilakukan oleh masyarakat seseorang yang memberikan nilai swadaya yang berlebih akan diharapkan juga menerima nilai swadaya yang berlebih juga dikemudian hari. Dan orang yang memberi nilai swadaya tinggi akan dianggap lebih berwibawa di mata masyarakat. Banyaknya tamu undangan membawa buah tangan kepada pemilik rumah tergantung seberapa dekat secara sosial antara tamu dan pemilik rumah. Semakin dekat tamu dengan pemilik maka jumlah buah tangan yang diberikan

lebih dibandingkan dengan yang biasa. Selain itu, status sosial tinggi si pemilik rumah juga mempengaruhi. Semakin tinggi status sosial seseorang, maka tamu undangan yang memberikan juga segan memberi sedikit.

G. Metodologi

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka (Afrizal, 2015: 13). Penelitian kualitatif dilakukan karena ada suatu permasalahan atau isi yang perlu dieksplorasi. Pada gilirannya, eksplorasi ini diperlukan karena adanya kebutuhan untuk mempelajari suatu kelompok atau populasi tertentu, mengidentifikasi variabel-variabel yang tidak mudah untuk diukur. Selain itu, penggunaan metode penelitian kualitatif dikarenakan perlunya membutuhkan suatu pemahaman yang detail dan lengkap tentang permasalahan tersebut (Creswell, 2015: 63-64).

Metode penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai metode penelitian Ilmu-ilmu Sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka. Namun tidak berarti penelitian kualitatif tabu terhadap angka-angka. Karena peneliti yang menggunakan

penelitian kualitatif perlu mengumpulkan dan menganalisis angka-angka apabila diperlukan. Data ini pada dasarnya digunakan sebagai pendukung interpretasi atau temuan dalam penelitian (Afrizal, 2015: 13).

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan studi tentang suatu kasus dalam kehidupan nyata, dalam konteks atau setting kontemporer (Yin, 2009, dalam Creswell, 2015: 135). Sebagai suatu upaya penelitian, studi kasus dapat memberi nilai tambah pada pengetahuan kita secara unik tentang fenomena individual, organisasi, sosial, dan politik (Yin, 2005: 4). Sedangkan penelitian naratif merupakan tipe desain kualitatif yang spesifik, yang narasinya dipahami sebagai teks yang dituturkan atau dituliskan dengan menceritakan tentang peristiwa/aksi atau rangkaian peristiwa/aksi, yang terhubung secara kronologis (Czarniawska, 2004, dalam Creswell, 2015: 96).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di Nagari Tiku Utara , Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi ini karena kawasan ini merupakan salah satu tempat yang menjadi sasaran program BSPS dan sekaligus terdapat keunikan budaya yang menjadi bentuk swadaya masyarakat Nagari Tiku Utara, yaitu *baralek batagak kudo-kudo*.

3. Informan Penelitian

Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemilihan informan

dilakukan dengan teknik-teknik tertentu yang tujuannya adalah untuk menjangkau dan mencari sebanyak mungkin informasi. Informan dipilih dengan teknik *Nonprobabilitas Sampling* karena tidak semua individu (anggota populasi) dapat dijadikan sumber informasi. Teknik dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pemilihan informan dimana informan akan dipilih sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Hal tersebut juga berarti bahwa peneliti memilih individu-individu dan tempat untuk diteliti karena mereka dapat secara spesifik memberi pemahaman tentang penelitian dan fenomena dalam penelitian tersebut (Creswell, 2015: 216). Adapun kriteria yang dirumuskan oleh peneliti adalah berdasarkan pertimbangan pengetahuan informan mengenai proses BSPS di Nagari Tiku Utara.

Setelah memilih individu yang memiliki pemahaman tentang informasi yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini, peneliti kemudian membagi informan tersebut berdasarkan informan kunci dan informan biasa. Koentjaraningrat (1997: 165) menyebutkan dalam pengambilan data menggunakan informan yang ditetapkan terbagi atas dua yaitu informan kunci dan informan biasa. Informan kunci adalah orang yang dapat memberikan informasi hal yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Informan kunci ditetapkan berdasarkan pengetahuan yang luas yang dimiliki sehingga benar-benar memiliki jawaban dari permasalahan yang ada dan mempunyai kemampuan untuk menjelaskan tentang apa yang sedang diteliti. Sedangkan informan biasa adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi terbatas menyangkut berbagai hal yang berhubungan

dengan penelitian. Dengan demikian, pemilihan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Informan Kunci

Di dalam penelitian ini, informan kuncinya adalah 5 orang penerima BPS. Kriteria yang menjadi informan kunci bagi peneliti adalah (1) penerima BPS (2) bersedia menjadi informan peneliti. Selain itu kriteria informan yang menjadi pedoman peneliti adalah bahwa dari 5 penerima BPS tersebut memiliki keterwakilan cerita atau pengalaman yang berbeda dari penerima BPS. Dan 5 informan tersebut merupakan hasil rekomendasi dari 1 orang informan yaitu Ketua Jorong yang membantu peneliti mencari informan yang sesuai dan menunjukkan lokasi rumah penerima BPS.

b. Informan Biasa

Informan biasa yang akan peneliti pilih adalah 5 orang informan yang merupakan 3 orang perangkat Nagari, 1 informan dari Kementerian PUPR dan 1 informan merupakan pemilik toko bangunan tempat pihak BPS bekerja sama dalam menyuplai bahan bangunan. Perangkat nagari merupakan awal pertama peneliti mendapatkan informasi mengenai keadaan lokasi penelitian. Informan dari Kementerian PUPR membantu peneliti mendapatkan informasi tentang BPS dari sudut program secara etik. Dan pemilik toko bangunan merupakan bagian dari berlangsungnya program BPS ini.

Berikut adalah nama-nama informan yang telah peneliti wawancarai:

Tabel 1.
Informan Penelitian

| No | Nama | Umur | Jenis Kelamin | Keterangan | Kriteria Informan |
|----|------|----------|---------------|--|-------------------|
| 1 | W | 54 tahun | Laki-Laki | Pak Camat | Informan biasa |
| 2 | A | 42 tahun | Laki-Laki | Wali Nagari Tiku Utara | Informan biasa |
| 3 | N | 55 tahun | Laki-Laki | Kepala Jorong Durian Kapeh | Informan kunci |
| 4 | D | 42 tahun | Laki-Laki | Penerima BSPTS | Informan kunci |
| 5 | Z.E | 44 tahun | Laki-Laki | Penerima BSPTS | Informan kunci |
| 6 | A.I | 53 tahun | Perempuan | Ibu Jorong | Informan biasa |
| 7 | ZA | 41 tahun | Laki-Laki | Penerima BSPTS | Informan kunci |
| 8 | S | 47 tahun | Laki-Laki | Pemilik Toko Bangunan Melly | Informan biasa |
| 9 | SU | 45 tahun | Laki-Laki | Penerima BSPTS | Informan kunci |
| 10 | Z | 52 tahun | Laki-Laki | Penerima BSPTS | Informan kunci |
| 11 | A.H | 34 tahun | Laki-Laki | Petugas SNVT Penyediaan Perumahan Sumbar | Informan biasa |

Sumber : Data Primer 2020

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab, yang dilakukan berdasarkan topik tertentu. Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah suatu wawancaraitanpa alternatif pilihan jawaban dan dilakukan untuk mendalami informasi dari seorang informan (Afrizal, 2015: 136). Wawancara mendalam ini dilakukan secara terbuka, akrab, dan kekerluargaan. Hal itu bertujuan agar kegiatan wawancara tidak kaku dan informasi yang diperoleh tidak mengada-ada atau ditutup-tutupi, sehingga penulis mendapatkan data yang maksimal. Bahkan menurut Taylor, wawancara perlu dilakukaniberulang-ulang kali antara pewawancara dengan informan (Taylor, 1984 dalam Afrizal, 2015:

136). Wawancara menurut Creswell (2013: 267) adalah suatu proses pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan – pertanyaan secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan.

Ada beberapa jenis wawancara menurut Creswell (2013: 267) yaitu wawancara mendalam, melalui telpon, *focus grup discussion*, atau wawancara internet dengan email. Jenis wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara secara mendalam.

Sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu membuat pedoman wawancara yaitu daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yaitu pelaksanaan BSPS dan sistem *alek*. Hal ini dilakukan agar pertanyaan lebih terarah dan informasi sesuai dengan yang diperlukan dalam penelitian. Peneliti juga memerlukan buku catatan, pena dan alat perekam untuk membantu peneliti mengingat informasi yang disampaikan saat wawancara. Dengan menuliskan atau merekamnya, memudahkan peneliti untuk mengolah data dan menuliskannya ke dalam penulisan penelitian.

b. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan menurut Creswell (2013: 267-268) adalah sebuah aktivitas melihat serta mencatat/merekam perilaku dan aktivitas individu-individu dilokasi penelitian dengan cara terstruktur maupun semistruktur. Menurut Bachtiar pengamatan adalah suatu usaha untuk memperoleh sebanyak mungkin pengetahuan mengenai lingkungan alam manusia dan mengenai kegiatan manusia

dalam hubungannya satu sama lain serta masalah yang ditimbulkan (Koentjaraningrat, 1973;127-130).

Observasi partisipasi atau pengamatan partisipasi adalah pengamatan langsung dengan melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan kelompok atau masyarakat yang diteliti (Bungin, 2010: 191). Dengan kata lain, peneliti ikut langsung berpartisipasi dalam kegiatan informan. Sifat khas observasi partisipasi adalah adanya pemanfaatan sebaik mungkin hubungan antara peneliti dan para informan dengan cara yang berbeda-beda tergantung keadaannya. Sehingga informan bertindak dan bertingkah laku sebagaimana adanya di lapangan. Seorang peneliti yang melalui teknik observasi partisipasi di dalam masing-masing sektor berkesempatan untuk memperoleh gambaran umum tersebut yang mungkin tidak dapat dihasilkan melalui teknik laini (Berreman dalam Bungin, 2010: 191).

Faktor lain penggunaan observasi partisipasi ini mengingat bahwa para informan pada hakekatnya hanya dapat memberikan data berdasarkan suatu proses persepsi yang ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan kognitif yang bagi setiap informan berbeda-beda serta dalam hal kebiasaan untuk memverbalisasi (menjelaskan melalui idiom tertentu) pengalamannya dan kejadiannya dapat menjadi pertimbangan (Creswell, 2015: 76).

c. Studi Literatur

Studi Literatur dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dibutuhkan di dalam penelitian. Sumber – sumber literatur yang digunakan adalah jurnal ilmiah terbitan 10 tahun terakhir baik nasional maupun internasional, skripsi, dan catatan dari perkuliahan Metode Kualitatif. Studi literatur sudah

dilakukan sebelum dan selama melakukan penelitian di lokasi yang direncanakan. Peneliti melakukan studi literatur untuk menjelaskan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian serta memberikan gambaran awal sebelum dilakukannya penelitian langsung di tempat penelitian.

d. Dokumentasi

Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif akan semakin tinggi jika melibatkan/menggunakan studi dokumen dalam metode penelitian kualitatifnya (Sugiyono, 2005:83, dalam Nilamsari, 2014: 178-179). Maksudnya peneliti akan mengabadikan berbagai hal yang dapat membantu proses penelitian seperti foto keadaan lokasi penelitian, berkas data, dll.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menyiapkan dan mengorganisasikan data (yaitu data teks seperti transkrip atau data gambar seperti foto) untuk analisis, kemudian mereduksi data tersebut menjadi tema melalui proses pengodean dan peringkasan kode, dan terakhir menyajikan data dalam bentuk bagan, tabel atau pembahasan (Creswell, 2013:251).

Peneliti melakukan analisis data dimulai dari lokasi penelitian yaitu dari informasi yang dilakukan saat wawancara dan pengamatan. Informasi tersebut

dikumpulkan, dipelajari dan direduksi agar memperoleh gambaran tentang hasil pengamatan sehingga memperoleh kesimpulan dan data yang dicari dalam permasalahan penelitian. Saat menganalisis data, data diklasifikasikan ke proses BSPTS, tahapan *alek* dan maknanya bagi masyarakat, respon masyarakat terhadap BSPTS. Semua data tersebut dilihat berdasarkan kehidupan sosial budaya masyarakat di Nagari Tiku Utara.

H. Proses Jalannya Penelitian

Pada tahap awal, peneliti terlebih dahulu menyusun proposal penelitian dan konsultasi dengan dosen Pembimbing Akademik yang dimulai pada bulan September 2018. Setelah itu, dosen PA menyarankan untuk mendaftar Ujian Komprehensif Tertulis sebagai syarat untuk mengajukan SK Pembimbing. Peneliti melanjutkan bimbingan proposal dengan kedua pembimbing yang tertera pada SK Pembimbing. Pada tahap selanjutnya peneliti meminta surat izin ke jurusan dan fakultas untuk melakukan survei awal ke lokasi penelitian yaitu ke Kecamatan Tanjung Mutiara. Pada awalnya peneliti melakukan wawancara dengan Pak Wen, selaku Camat Tanjung Mutiara. Peneliti menanyakan terkait BSPTS secara umum dan juga mendatangi wali nagari Tiku Utara. Akhirnya setelah beberapa pertimbangan, peneliti melakukan penelitian ke Nagari Tiku Utara.

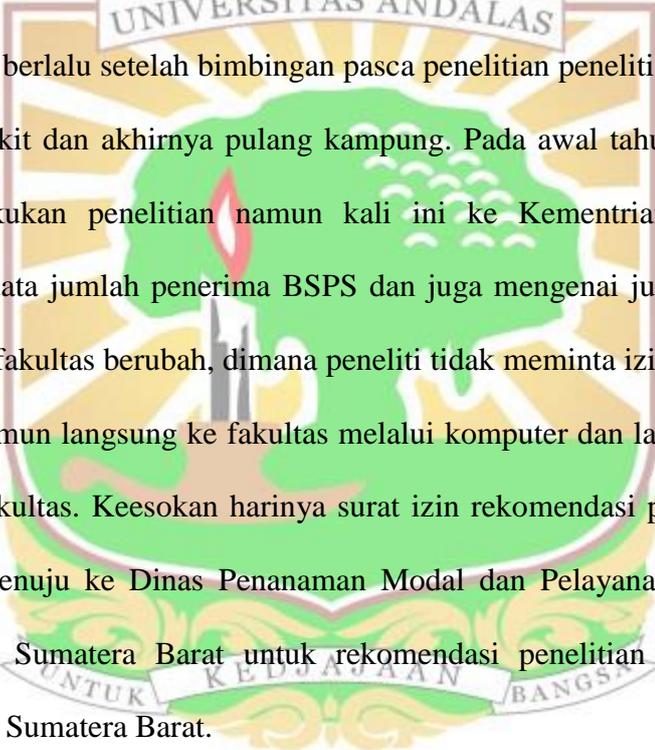
Setelah melakukan bimbingan selama lebih kurang 5 bulan Alhamdulillah pada awal bulan Februari 2019 proposal peneliti disetujui dan dilanjutkan dengan seminar proposal pada tanggal 12 Februari 2019. Setelah dinyatakan lulus dalam seminar proposal peneliti kemudian menyelesaikan urusan administrasi dengan

jurusan dan fakultas. Dilanjutkan dengan bimbingan dan merevisi proposal karena ada beberapa bagian dalam proposal yang harus diperbaiki sebagai dasar dari penelitian selanjutnya. Peneliti kemudian mengurus surat izin penelitian ke jurusan dan fakultas kemudian melakukan penelitian pada bulan Agustus 2019. Sebelum berangkat ke lokasi penelitian, peneliti terlebih dahulu konsultasi dengan pembimbing dan membuat *outline* penelitian.

Selama di lokasi penelitian, peneliti menginap di rumah Pak Nusirman, wali jorong Durian Kapeh Nagari Tiku Utara selama 3 hari. Melalui Pak Nusirman peneliti meminta rekomendasi informan penelitian yang bisa diwawancarai. Pada hari pertama wawancara peneliti mengobrol dengan 3 informan yang merupakan penerima bantuan BPS. Pada saat inilah peneliti bertanya mengenai cerita BPS yang dilakukan oleh penerima dan melihat langsung rumah penerima yang selesai dibangun. Penerima dengan antusias menceritakannya dengan khas logat minang daerah Tiku.

Pada hari kedua, peneliti ke kantor wali Nagari dan meminta data profil Nagari Tiku Utara untuk mengerjakan BAB II yaitu mengenai deskripsi lokasi penelitian. Pada hari ketiga peneliti ngobrol bersama dengan masyarakat di warung untuk bertanya sedikit adat dan budaya di sini setelah itu Pak Nusirman mengajak peneliti ke rumah salah satu kerabatnya untuk melihat langsung proses *mangantaan tando*. Ini merupakan pertama kali peneliti melihat acara seperti ini karena peneliti berasal dari Sumatera Utara.

Keesokan harinya peneliti kembali ke kota Padang dan menulis hasil wawancara yang peneliti dapatkan. Peneliti kemudian kembali lagi ke lokasi penelitian. Peneliti bertanya kembali ke Pak Nusirman dan juga ke toko bangunan yang dijadikan sebagai pusat para penerima bantuan mengambil material bahan bangunan. Pemilik toko bangunan termasuk salah satu informan yang sulit peneliti wawancarai dikarenakan situasi toko yang bising dan juga disibukkan dengan adanya pelanggan yang ingin mengangkat barang.



2 bulan berlalu setelah bimbingan pasca penelitian peneliti tanpa kemajuan dikarenakan sakit dan akhirnya pulang kampung. Pada awal tahun 2020 peneliti kembali melakukan penelitian namun kali ini ke Kementerian PUPR untuk mendapatkan data jumlah penerima BPS dan juga mengenai juknis dari BPS. Karena sistem fakultas berubah, dimana peneliti tidak meminta izin penelitian dari jurusan lagi namun langsung ke fakultas melalui komputer dan langsung lapor ke administrasi fakultas. Keesokan harinya surat izin rekomendasi penelitian keluar dan peneliti menuju ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat untuk rekomendasi penelitian ke Kementerian PUPR Provinsi Sumatera Barat.

Yang menjadi tantangan untuk peneliti adalah menemukan Kemetrian PUPR yang menyediakan data tentang BPS. Awalnya peneliti menuju PUPR yang berada di jalan Khatib Sulaiman dekat SMP Al Azhar. Namun pak satpam mengarahkan kami ke PUPR yang berada di dekat Universitas Taman Siswa karena PUPR yang berada di jalan Khatib Sulaiman datanya mengenai curah hujan. Sesampainya di PUPR yang berada di dekat Universitas Taman Siswa

peneliti dituntun ke bagian administrasi untuk menunjukkan surat rekomendasi penelitian dari Dinas Penanaman Modal. Butuh waktu 1 minggu agar peneliti bisa mendapatkan data yang diinginkan. Namun setelah 1 minggu berlalu peneliti kembali dan ternyata data mengenai BPS berada di bagian SNVT Penyedia Perumahan dan kantornya pindah ke daerah Belanti . Peneliti kemudian menuju ke sana dan Alhamdulillah Bapaknya *welcome* menjelaskan dan memberikan data yang peneliti minta. Penulis akhirnya bimbingan kembali pada bulan Maret tahun 2020. Akibat kondisi pandemi korona penulis memutuskan untuk pulang kampung ke kota Padangsidimpuan sampai lebaran 2020. Pada bulan Juni 2020 penulis kembali melanjutkan revisi dan mewawancarai penerima BPS melalui telpon seluler serta bimbingan pada bulan Juli 2020. Alhamdulillah, dengan kemudahan yang diberikan Allah swt. Peneliti bisa acc pada tanggal 10 Agustus 2020 dan Alhamdulillah bisa ujian skripsi pada hari Selasa tanggal 08 September 2020.

